

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian analisis framing pemberitaan mengenai wacana Raja Perempuan Kraton Yogyakarta di Surat Kabar Harian (SKH) Kedaulatan Rakyat. Pertama akan dideskripsikan mengenai Wacana Raja Perempuan Kraton Yogyakarta Kedua adalah deskripsi mengenai berita mengenai wacana Raja Perempuan Kraton Yogyakarta. Terakhir adalah gambaran umum SKH Kedaulatan Rakyat yang diperoleh berdasarkan sumber *company profile* media tahun 2010 dan wawancara.

A. Wacana Raja Perempuan Kraton Yogyakarta

Dinamika yang ada di masyarakat mengalami perkembangan mengikuti arus zaman. Kedudukan laki-laki dan perempuan di masyarakat pada dasarnya adalah sama. Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk bebas berbicara, bekerja dan menjadi apapun yang mereka inginkan.

Kedudukan sebagai raja ataupun presiden sangat identik dengan laki-laki. Namun sejarah pernah mencatat pada abad VII Kerajaan Kalingga pernah dipimpin oleh raja perempuan yaitu Ratu Shima yang bergelar Sri Maharani Satyaputikeswara. Pada abad XVI, Elizabeth I juga bertakhta memimpin Inggris. Megawati Soekarno Putri merupakan perempuan Indonesia pertama yang menjabat sebagai presiden RI periode 2000-2004⁶⁰.

⁶⁰ Lihat dalam SKH Kedaulatan Rakyat. Kolom Analisis. *Perempuan Raja..* oleh Bambang Purwoko 27 Mei 2010.Hlm 27

Tidak ada salahnya jika tahta raja diduduki oleh kaum perempuan. Selama empat abad Yogyakarta dipimpin oleh raja laki-laki, mulai dari raja Bendara Raden Mas Bujono yang bergelar Hamengkubuwono I, hingga saat ini masih dipimpin oleh Bendara Raden Mas Herjuno Darpito yang bergelar Hamengkubowo X.

Pro dan kontra wacana mengenai raja perempuan di kraton Yogyakarta mengalir di masyarakat dan belum mencapai titik temu. Masing-masing pihak memiliki pendapat masing-masing yang kuat. Pihak yang mendukung wacana raja perempuan di Kraton Yogyakarta adalah demi kesetaraan gender. Perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama dan kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin.

Namun tidak sedikit pihak yang kurang setuju jika Kraton Yogyakarta dipimpin oleh perempuan. Kraton Yogyakarta telah berdiri lama dan memiliki tradisi yang sudah diterapkan sejak dulu. Salah satunya adalah *paugeran* atau *anger-anger* yang merupakan undang-undang kerajaan Yogyakarta. Salah satu isi *paugeran* adalah bahwa kedudukan raja dijabat oleh keturunan laki-laki. Sehingga jika menginginkan raja Kraton perempuan maka harus melakukan perubahan *paugeran*.

Permasalahannya melakukan perubahan *paugeran* bukanlah hal yang mudah. *Paugeran* dihormati oleh masyarakat Yogyakarta yang mencerminkan kewibawaan kraton. Banyak pihak menilai jika dilakukan perubahan *paugeran* akan mengundang banyak persoalan apalagi masalah RUUK DIY juga sampai saat ini belum selesai.

B. Berita mengenai Wacana Raja Perempuan Kraton Yogyakarta

SKH Kedaulatan Rakyat merupakan Koran lokal yang sangat peduli⁶¹ dengan permasalahan yang menyangkut Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai dari permasalahan RUUK DIY hingga wacana mengenai Raja Perempuan di Kraton Yogyakarta. SKH Kedaulatan Rakyat memberikan perhatian yang cukup tinggi dibandingkan dengan SKH lokal lainnya mengenai isu raja perempuan di kraton Yogyakarta. Berita-berita yang membahas mengenai wacana Raja Perempuan di kraton Yogyakarta ditempatkan pada halaman pertama dan menjadi *headline*.

Media massa memiliki sikap tersendiri terhadap berbagai persoalan dan peristiwa yang ada di masyarakat. Sikap media tergambar dalam berita-berita yang dimuat. Begitu pula dengan berita-berita mengenai wacana Raja Perempuan di Kraton Yogyakarta, SKH Kedaulatan Rakyat memiliki alasan dan pandangannya tersendiri dalam memberitakan mengenai wacana tersebut. Penempatan berita mengenai wacana raja perempuan Kraton Yogyakarta pada halaman depan di SKH *Kedaulatan Rakyat* tentu bukan tanpa alasan. Ada berbagai pertimbangan dan alasan yang membuat SKH Kedaulatan Rakyat memuat berita mengenai wacana raja perempuan di kraton Yogyakarta menjadi *headline*.

Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam SKH Kedaulatan Rakyat edisi 15 Mei 2010 memberikan tanggapan mengenai wacana tersebut sebagai berikut:
“Kita tidak membedakan laki-laki atau perempuan. Tapi di kraton kan ada paugeran (selama ini yang menjadi raja laki-laki). Sekarang masyarakat

⁶¹ Berdasarkan wawancara dengan pihak media *KR* pada tanggal 26 dan 28 Maret 2011 dengan Aksan Susanto yang diperkuat oleh Drs. Hudono selaku Redaktur Pelaksana

tuntutannya apa”. Sultan tidak menutup kemungkinan masyarakat menghendaki adanya perubahan, termasuk siapa yang akan memimpin kraton. Sultan lebih memilih menyerahkan pada masyarakat Yogya bagaimana nantinya wacana itu berkembang.

Pihak internal kraton sendiri, RM Tirun Marwito SH yang merupakan cucu Sultan HB VIII menyampaikan pendapatnya yang dimuat dalam SKH Kedaulatan Rakyat edisi 18 Mei 2010. *“Khusus tentang suksesi di lingkungan Kraton Yogyakarta telah mempunyai paugeran atau ketentuan dan pranatan atau tatacara yang sudah baku. Karena itu kita tidak perlu ngegege mangsa. Toh Sri Sultan hamengku Buwono X saat ini masih sehat bugar dan masih dapat melaksanakan tugasnya sebagai raja atau Sultan maupun sebagai Gubernur”*.

Wacana Raja Perempuan di Kraton Yogyakarta sulit untuk direalisasikan mengingat di dalam kraton telah ada *paugeran* (konstitusi kraton) telah ditetapkan. Perubahan paugeran juga bukan pekerjaan yang mudah. Seperti yang dimuat oleh SKH Kedaulatan Rakyat edisi 19 Mei 2010. *“Untuk mengatur, mengubah dan mengesahkan paugeran itu tidak mudah. Tapi di Kraton Yogyakarta ada semacam majelis yang berwenang untuk mengubah konstitusi yang antara lain di dalamnya adalah Sultan. Untuk mengubah pakem dalam kraton juga harus dilakukan kajian lebih dulu”*.

C. DESKRIPSI MEDIA

Data mengenai SKH Kedaulatan Rakyat diperoleh berdasarkan *company profile*⁶² sebagai berikut:

⁶² *Company Profile* KR berupa brosur yang peneliti dapatkan tanggal 25 April 2011

Nama Media	: Harian Umum Kedaulatan Rakyat
Jenis	: Surat Kabar Harian
Surat Izin penerbitan Pers	:SIUPP No. 127/SK/MENPEM/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990
Haluan	:Independen
Motto	: Migunani Tumraping Liyan, Sekecil apapun kebaikan yang kita perbuat bisa bermakna besar bagi orang lain. Berguna bagi sesama membuat hidup lebih berarti.
Alamat Redaksi	: Jalan Mangkubumi 40-42 Yogyakarta, 55232
Hari terbit	: Senin- Minggu (Setiap Hari)
Ukuran Halaman	: 58 cm x 38 cm
Jumlah Halaman	: 24 Halaman
Penerbit	: PT- BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta
Pemimpin Umum	:Drs. HM Romli
Pemimpin Redaksi	:Drs. Octo Lampito Mpd
Wakil Pemimpin Redaksi	: Drs. H. Ahmad Luthfie, MA Ronny Sugiantoro Spd, SE, MM

SKH Kedaulatan Rakyat merupakan harian nasional pertama di DIY yang lahir pada pasca revolusi kemerdekaan RI pada tanggal 27 September 1945 dengan mengantongi izin SIUPP No. 12/SK/MENPEN/A.7/1986 yang diperoleh pada tanggal 4 Desember 1990.

SKH Kedaulatan Rakyat menurut sejarahnya merupakan ‘koran revolusi’ yang tidak berpihak kepada salah satu golongan, agama atau salah satu partai. SKH Kedaulatan Rakyat lahir sebelum berdirinya partai-partai di Indonesia pada tanggal 3 November 1945. Sehingga SKH Kedaulatan Rakyat menyatakan bukan milik partai, kekuatan, organisasi kemasyarakatan, atau organisasi politik tertentu⁶³.

Berdasarkan filsafahnya *KR* “Suara Hati Nurani Rakyat” menunjukkan bahwa *KR* membawa amanat rakyat yang mewakili suara rakyat. Selain itu, *KR* berupaya untuk meningkatkan pengetahuan rakyat dengan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Salah satu kebijakan redaksional yang dijalankan oleh *KR* adalah independen⁶⁴. Sehingga reporter atau wartawan dalam menuliskan berita diharapkan seimbang, tidak memihak pada salah satu narasumber saja.

Setelah 65 tahun berlalu, Kedaulatan Rakyat tetap setia bersama rakyat berkarya dan menyebarkan informasi yang benar dan berimbang dengan cepat. Koran Kedaulatan Rakyat selalu ingin menyebarkan informasi dengan cepat dan tepat sasaran sehingga seluruh jurnalis *KR* siap mencari dan mengolah informasi dengan objektif dan berimbang⁶⁵.

Untuk memenuhi selera pembaca, koran Kedaulatan Rakyat berusaha menggunakan bahasa yang lugas dan gampang dicerna oleh pembacanya. Hal ini dilakukan karena koran Kedaulatan Rakyat melihat para pembacanya terdiri dari

⁶³ Dikutip dalam Lidwina Chometta. 2009. *Framing Opini Masyarakat tentang Polemik Jabatan Gubernur DIY dalam Koran Lokal DIY*. UAJY.Skripsi. Hlm 56

⁶⁴ Wawancara dengan Redaktur Pelaksana Hudono tanggal 28 Maret 2011

⁶⁵ *Company Profile* *KR* berupa brosur yang peneliti dapatkan tanggal 25 April 2011

berbagai kalangan dan lapisan masyarakat yang berbeda tingkat pendidikannya.

Berikut profil pembaca koran Kedaulatan Rakyat:

- Berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh laki-laki dengan prosentase sebesar 59,68% dan perempuan sebesar 40,37%.
- Berdasarkan jenis pekerjaan, didominasi oleh pelajar atau mahasiswa dengan prosentase 28,83%, buruh sebesar 21,85%, pekerja kantor sebesar 19,14%, pengusaha sebesar 16,22%, swasta sebesar 9,46% dan ibu rumah tangga sebesar 4,5%.
- Menurut tingkat pendidikan dibaca oleh lulusan SMA sebesar 51,15%, lulusan Universitas sebesar 13,96%, lulus SMP sebesar 12,85%, tidak lulus Sd sebesar 1,5% dan lulus S2/S3 sebesar 1,35%.

Tiras SKH Kedaulatan Rakyat mencapai 124.539 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tiras dan distribusi SKH Kedaulatan Rakyat⁶⁶

Derah Istimewa Yogyakarta		Daerah-Daerah Lainnya	
Kota Yogyakarta	49.229	Jawa Tengah	12.211
Sleman	35.534	Jawa Timur	724
Bantul	14.758	Jawa Barat	352
Kulon Progo	4.036	DKI Jakarta	1.937
Gunung Kidul	5.670	Kalimantan	88
		Sumatera	9
		Bali	24
Jumlah	109.227	Jumlah	15.312
TOTAL 124.539			

Selama 65 tahun berkarya berbagai penghargaan pernah diraih oleh SKH

Kedaulatan Rakyat⁶⁷ yaitu:

⁶⁶ *Company Profile* KR berupa brosur yang peneliti dapatkan tanggal 25 April 2011

⁶⁷ *Company Profile* KR berupa brosur yang peneliti dapatkan tanggal 25 April 2011

1. Cakram Award 2006 sebagai media cetak lokal terbaik 2006
2. Peringkat 7 jumlah pembaca pada kategori All people menurut survey Neilsen Media Research Wave III tahun 2006
3. 10 Besar Koran Terbaik 2005 dari Dewan Pers
4. Peringkat 4 perolehan iklan nasional periode Januari-Desember 2005 menurut survey Neilsen Media Research

Seiring dengan dinamika serta perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi SKH Kedaulatan Rakyat hadir dalam versi on-line untuk memudahkan pembaca memperoleh informasi. Para pembaca dapat mengakses berita-berita SKH Kedaulatan Rakyat melalui situs: <http://kr.co.id>.